

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB SISTEM PRODUKSI AGRIBISNIS KAKAO
DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

*INSTITUTIONAL STRENGTHENING STRATEGY
FOR COCOA AGRIBUSINESS PRODUCTION SUB SYSTEM
IN MAJENE DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE*



**RAHMA KHAERATI
P042211017**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB SISTEM PRODUKSI AGRIBISNIS KAKAO
DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

**RAHMA KHAERATI
P042211017**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB SISTEM PRODUKSI AGRIBISNIS KAKAO
DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Agribisnis

Disusun dan diajukan oleh

RAHMA KHAERATI

P042211017

Kepada

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN SUB SISTEM PRODUKSI
AGRIBISNIS KAKAO DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT

RAHMA KHAERATI
P042211017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada 08 Maret
2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Agribisnis
Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Muh. Hatta Jamil, S.P., M.Si
NIP. 196712231995121001

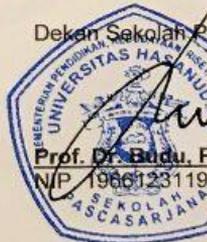
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Ir. Muh. Hatta Jamil, S.P., M.Si
NIP. 196712231995121001

Pembimbing Pendamping

Prof. Ir. Muhammad Arsyad, S.P., M.Si., Ph.D
NIP. 197506092006041003

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Baidi, Ph.D., Sp.M (K), M.MedEd
NIP. 196612311995031009

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul " Strategi Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat " adalah benar karya saya dengan arahan dan tim pembimbing utama Prof. Dr. Ir. Muh Hatta Jamil., S.P., M.Si. dan tim pembimbing pendamping Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Nama, Volume, Halaman, dan DOI) Sebagian artikel dengan judul xxx Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku .

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2024



Rahma Khaerati
P042211017

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan tesis ini, tentunya banyak tantangan serta hambatan yang penulis dapatkan. Namun berkat ridho-Nya, bantuan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu sebagai ungkapan rasa hormat yang tulus, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K), M. MedEd selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh Hatta Jamil., S.P., M.Si selaku Ketua Program Studi S2 Agribisnis, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan sebagai Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Prof. Ir. Muhammad Arsyad., S.P., M.Si., Ph.D. selaku Dosen pembimbing II, yang telah memberi dukungan penuh serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Nasaruddin., M.S. selaku penguji I yang telah membantu dalam memberikan arahan terbaik mulai dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Ir. Rahmadanih, M.S. selaku penguji II yang telah secara aktif memberikan support dan arahan kepada penulis.
7. Ibu Pipi Diansari, S.E., M.Si., Ph.D. selaku penguji III yang juga turut berpartisipasi aktif dalam membantu penyusunan tugas akhir program Magister ini.
8. Bapak dan Ibu, para dosen Prodi S2 Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bimbingan, arahan dan jasa-jasa beliau selama penulis menimba ilmu di bangku perkuliahan.
9. Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta, Ayah saya Jalaluddin Sukkari (*Alm.*) dan Ibu Saya St. Asia Samasang. Terima kasih yang tak terhingga atas segala perjuangan, do'a dan usaha yang tiada henti-hentinya dalam mendukung saya untuk mengejar ilmu setinggi-

tingginya. Juga kepada om saya, Bapak Sudirman Samasang. Terimakasih atas segala do'a dan dukungannya.

10. Terima kasih banyak kepada kakak saya, Prof. Ir. Muhammad Arsyad., S.P., M.Si., Ph.D. dan Ibu Nurlailah Syam, S.Pd., M.Pd, sosok inspiratif yang luar biasa sehingga kami tetap semangat berjuang dalam menggapai cita-cita. Kepada Bapak Dr. Muhammad Aswad, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Wahdaniyah, S.KM., M.Kes. yang senantiasa memberi dukungan terhadap proses akademik penulis. Kepada Bapak Samsuddin, P. Dan Ibu Nurbiah, S.Pd., AUD, Bapak Masmar dan Ibu Amliani S.Pd., AUD. Juga Bapak Ruslan, S.E dan Ibu Armiani, S.Pd. atas dorongan moril maupun materil selama proses akademik hingga penyelesaian tesis ini.
11. Kepada seluruh teman seperjuangan Prodi S2 Agribisnis angkatan 2021 yang telah membantu penulis, juga terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah berpartisipasi dalam penyusunan tesis ini.

Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga bantuan kita semua untuk penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, aamiin. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membaca.

Makassar, 13 Februari 2024

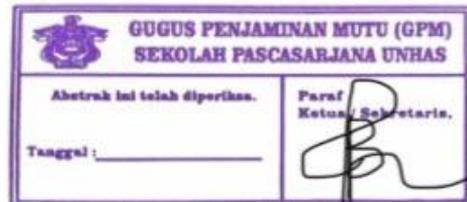
Penulis

ABSTRAK

Rahma Khaerati. *Strategi Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.* (Dibimbing oleh **Muh. Hatta Jamil dan Muhammad Arsyad**).

Sub sektor perkebunan, terutama kakao memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, mutu dan produksi kakao Indonesia mengalami fluktuasi dan rendah dibandingkan Afrika dan implementasinya memerlukan dukungan aktif dari pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga yang terlibat dalam sub sistem produksi agribisnis kakao, menganalisis lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga, dan menentukan program strategis penguatan kelembagaan dalam sub sistem produksi agribisnis kakao. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengolahan data menggunakan ISM (*Interpretative Structural Modelling*). Tiga kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini. Pertama, lembaga yang terlibat diantaranya Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penelitian Pertanian, Lembaga Pendidikan Pertanian, Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, Lembaga Sertifikasi dan Standardisasi, Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Ekspor-Impor, Asosiasi Petani Kakao, Kelompok Tani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Kedua, kendala lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga diantaranya, kompleksitas kelembagaan, kebijakan pemerintah yang belum efektif, kurangnya optimalisasi peran kelompok tani, fluktuasi produksi dan mutu kakao yang rendah serta keterbatasan akses pemasaran dan pembiayaan. Ketiga, proses identifikasi lembaga terlibat, analisis lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga, strategi memperluas akses pemasaran, peningkatan peran PPL dalam pendampingan petani, serta upaya peningkatan produksi melalui strategi pengelolaan risiko iklim dan pengembangan diversifikasi produk turunan kakao serta pengembangan jaringan distribusi agar petani kakao di Kabupaten Majene dapat menghasilkan produksi yang stabil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penguatan Kelembagaan, Sub Sistem Produksi, Agribisnis, ISM, Kakao.*



ABSTRACT

Rahma Khaerati. *Institutional Strengthening Strategy for Cocoa Agribusiness Production Sub System in Majene District, West Sulawesi Province.* (Supervised by **Muh. Hatta Jamil and Muhammad Arsyad**).

The plantation sub-sector, especially cocoa, has an important role in the Indonesian economy. However, the quality and production of Indonesian cocoa fluctuates and is low compared to Africa and its implementation requires active support from the government and the community. This study aims to identify institutions involved in the cocoa agribusiness production sub-system, analyze the weak coordination function between institutions, and determine strategic programs for institutional strengthening in the cocoa agribusiness production sub-system. This research uses qualitative descriptive method with data processing using ISM (Interpretative Structural Modelling). Three conclusions were reached in this study. First, the institutions involved include the Ministry of Agriculture, the Agricultural Extension and Human Resources Development Agency, the Agricultural Quarantine Agency, State-Owned Enterprises, Agricultural Research Institutes, Agricultural Education Institutions, Research Institutes/Universities, Financial Institutions, Certification and Standardization Institutions, Export-Import Supervision and Control Institutions, Cocoa Farmers Associations, Farmer Groups and the Regional Government of Majene Regency. Second, the constraints of the weak coordination function between institutions, including institutional complexity, ineffective government policies, lack of optimization of the role of farmer groups, low fluctuations in cocoa production and quality and limited access to marketing and financing. Third, the identification process of the institutions involved, analysis of the weak coordination function between institutions, strategies to expand marketing access, increase the role of PPL in assisting farmers, as well as efforts to increase production through climate risk management strategies and the development of diversification of cocoa derivative products as well as the development of distribution networks so that cocoa farmers in Majene Regency can produce stable and sustainable production.

Keywords: *Institutions strengthening, Production sub-systems, Agribusiness, ISM, Cocoa.*

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa. Tanggal : _____	Paraf Ketua Sekretaris. 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pembangunan Pertanian	5
2.2. Aspek Kelembagaan Kelompok Tani	7
2.3. <i>Interpretative Structural Modeling (ISM)</i>	13
2.4. Konsep Agribisnis	14
2.5. Konsep Strategi	15
2.6. Tanaman Kakao dan Fluktuasi Harga Kakao	16
2.7. Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Biji Kakao di Indonesia	17
2.8. Hasil Penelitian Terdahulu	19
2.9. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Rancangan Penelitian	24
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3. Jenis dan Sumber Data	24
3.4. Tahapan Penelitian	24
3.5. Metode Analisis	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2. Lembaga yang Terlibat dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene	37
4.3. Kendala yang Mempengaruhi Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene	47
4.4. Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Data Volume Produksi Biji Kakao Indonesia selama 5 tahun terakhir (2022).....	3
2. Data Produksi Dan Produktivitas Kakao Per Kabupaten di Sulawesi Barat selama tahun terakhir (2019-2021).....	3
3. Hasil Penelitian Terdahulu.....	19
4. Sistem/Elemen dan Sub Sistem/Sub Elemen yang menjadi Bahan Kuesioner Penelitian.....	25
5. Bentuk Hubungan Kontekstual dan Matematis antara Sub elemen I dan J.....	30
6. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2022.....	34
7. Jumlah Produksi Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2022.....	35
8. Jumlah Kelompok Tani Perkebunan di Kabupaten Majene Tahun 2023.....	36
9. Penggolongan Ukuran Biji Kakao	63
10. Persyaratan Umum Biji Kakao.....	63
11. Persyaratan Khusus Biji Kakao.....	64

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	23
2. Diagram Alur Tahapan Penelitian.....	28
3. <i>Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)</i>	29
4. <i>Final Reachability Matrix</i>	30
5. <i>Directional Graph Driver Power dan Dependence (DP-D)</i>	31
6. Peta Provinsi Sulawesi Barat.....	32
7. Peta Kabupaten Majene.....	32
8. SSIM Lembaga yang Terlibat dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	38
9. <i>Initial Reachability Matrix</i> Lembaga yang Seharusnya Berperan dalam Sub sistem Produksi Agribisnis kakao di Kabupaten Majene.....	39
10. <i>Final Reachability Matrix</i> Lembaga yang Seharusnya Berperan dalam Sub sistem Produksi Agribisnis kakao di Kabupaten Majene.....	39
11. <i>Canonical Matrix</i> Lembaga yang Seharusnya Berperan dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	41
12. <i>Directional Graph (DP-D)</i> Lembaga yang Seharusnya Berperan dalam Sub sistem Produksi Agribisnis kakao di Kabupaten Majene.....	42
13. Strukturisasi Level Lembaga yang Seharusnya Berperan dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	44
14. SSIM Kendala Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	47
15. <i>Initial Reachability Matrix</i> Kendala Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	48
16. <i>Final Reachability Matrix</i> Kendala Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	49
17. <i>Canonical Matrix</i> Kendala Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	50
18. <i>Directional Graph (DP-D)</i> Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	52
19. Strukturisasi Level Kendala Lemahnya Fungsi Koordinasi antar Lembaga dalam Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	54
20. SSIM Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	56
21. <i>Initial Reachability Matrix</i> Program Strategis Penguatan	

Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	56
22. <i>Final Reachability Matrix</i> Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	57
23. Canonical Matrix Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	58
24. <i>Directional Graph (DP-D)</i> Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	59
25. Strukturisasi Level Program Strategis Penguatan Kelembagaan Sub Sistem Produksi Agribisnis Kakao di Kabupaten Majene.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Kuesioner Penilaian Lembaga dan Program Strategis dengan ISM.....	78
2. Isian Kuesioner oleh Pakar 1.....	88
3. Isian Kuesioner oleh Pakar 2.....	94
4. Isian Kuesioner oleh Pakar 3.....	100
5. Isian Kuesioner oleh Pakar 4.....	106
6. Isian Kuesioner oleh Pakar 5.....	112
7. Isian Kuesioner oleh Pakar 6.....	118
8. Isian Kuesioner oleh Pakar 7.....	124
9. Dokumentasi Penelitian.....	130
10. Daftar Informan (Pakar).....	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subsektor perkebunan merupakan subsektor penunjang yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional dalam berbagai hal, termasuk berperan sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani, bahan baku industri, sumber kebutuhan pokok negara, dan penghasil devisa negara. Kakao merupakan komoditas perkebunan yang perlu mendapat perhatian serius, karena besarnya peran kakao dalam perekonomian negara (Jinap, Hasnol, Sanny, & Jahurul, 2018).

Kakao mempunyai potensi untuk menjadi tanaman berharga yang ditanam di perkebunan Indonesia (Utomo, Prawoto, Bonnet, Bangwiwat, & Gheewala, 2016). Menurut Nair (2011), kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional memegang peranan yang cukup signifikan. Peran ini penting terutama karena membuka lapangan kerja, merupakan sumber devisa terbesar ketiga dari sub sektor perkebunan setelah karet dan kelapa sawit. Organisasi Kakao Internasional (ICCO), meskipun mendapat peringkat tinggi, melaporkan bahwa produksi kakao mengalami penurunan atau berfluktuasi. Padahal produksi kakao merupakan industri primer.

International Cocoa Organization (ICCO) berpendapat, terdapat indikasi penurunan produksi kakao dari skala nasional hingga kabupaten, dan pendapat tersebut didukung oleh data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain itu, kondisi kualitas kakao yang diproduksi di Indonesia harus terus menjadi perhatian utama semua pihak yang terlibat dalam sub sistem produksi kakao. Hal ini disebabkan karena kualitas kakao yang dihasilkan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kualitas kakao yang diproduksi di Afrika, khususnya kakao yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat (Manalu, 2018).

Potensi pertanian Indonesia sangat besar. Besarnya potensi ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan berdampak positif terhadap ketahanan dan swasembada pangan nasional, yang tidak hanya berpotensi meningkatkan devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, namun juga berpotensi mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di masyarakat. Namun, jika pemerintah dan masyarakat tidak mengenali dan memanfaatkan potensi tersebut, maka masyarakat tidak akan pernah mencapai swasembada pangan, peningkatan devisa ekspor pangan, dan kualitas hidup yang tinggi secara keseluruhan (Manalu, 2018).

Masyarakat yang sadar akan potensi yang sangat besar ini tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas produk pertanian yang dapat dijual di pasar internasional. Senada dengan pemerintah, jika seluruh aparat pemerintah menyadari besarnya potensi pertanian Indonesia dan berpeluang menjadi pemasok

pangan dunia, maka pemerintah selayaknya memberikan dukungan penuh kepada seluruh elemen yang terlibat dengan merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung perluasan produksi pertanian (Bartholomius, 2013).

Membangun kelembagaan yang lebih kuat dalam sub sistem produksi agribisnis kakao merupakan langkah penting menuju peningkatan kinerja dan produktivitas industri kakao secara keseluruhan. Adapun strategi awal yang dapat dilaksanakan antara lain sebagai berikut: penyusunan rencana strategis; identifikasi permasalahan utama; penguatan organisasi petani; pembangunan infrastruktur; penyediaan jasa keuangan; konsolidasi rantai pasokan; pemanfaatan teknologi informasi; perluasan pasar dan penambahan nilai; serta pemantauan dan evaluasi. Strategi-strategi tersebut berpotensi menjadi landasan dalam membangun perencanaan perbaikan kelembagaan sub sistem produksi agribisnis kakao. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan strategi ini perlu disesuaikan dengan keadaan dan konteks spesifik wilayah setempat, dan juga harus melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di industri kakao (Listyati, Wahyudi, & Hasibuan, 2014).

Pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap potensi komoditas kakao dengan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi kakao nasional. Upaya tersebut mulai dari kebijakan perluasan areal dan penanaman Bea Keluar (BK) hingga Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) yang dilaksanakan di 25 provinsi dan berlangsung antara tahun 2009 hingga 2014 (Utami, 2020). Dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan budidaya kakao yang banyak terserang berbagai penyakit dan hama (Bartholomius, 2013). Hal ini akan berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas kakao yang diproduksi secara nasional. Hasil kakao pasca Gernas menunjukkan perbaikan yang signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi kakao nasional. Berdasarkan data produksi kakao, permasalahan yang disebabkan oleh sifat siklus produksi kakao tidak dapat diselesaikan.

Produksi kakao di Sulawesi Barat tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduknya. Total produksi kakao pada tahun 2011 sebanyak 122.256 ton, dan luas perkebunan kakao di Sulawesi Barat mencapai 194.281 hektar (Dikjenbun, 2021). Salah satu sentra produksi kakao di Sulawesi barat yaitu Kabupaten Majene yang memiliki luas wilayah 947,84 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 153,743 jiwa yang tersebar pada 8 kecamatan.

Kontribusi kakao terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 20% terhadap pembentukan PDRB Majene. Ini merupakan kontribusi terbesar dari sektor manapun. Saat ini, seluruh budidaya dan pengelolaan perkebunan kakao dilakukan oleh petani setempat, dan sebagian besar lahan berada di tangan swasta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertanian kakao

pada umumnya merupakan bisnis keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi petani kakao (Dikjenbun, 2021).

Tabel 1. Data Volume Produksi Biji Kakao Indonesia selama 5 tahun terakhir (2018-2022)

No.	Tahun	Produksi Kakao (ton)
1	2018	751,7
2	2019	729,4
3	2020	716,6
4	2021	686,4
5	2022	665,4

Produksi biji kakao di Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir, Indonesia memproduksi biji kakao seberat 665.4 ton pada tahun 2022. Volume ini turun sebesar 5.46% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan produksi biji kakao juga sudah terjadi lima kali berturut – turut sejak tahun 2018, seperti terlihat pada grafik. Secara tren, produksi biji kakao terbesar tercatat pada tahun 2018 mencapai 751.7 ton. Sementara produksi biji kakao terendah tercatat pada tahun 2022.

Tabel 2. Data Produksi Dan Produktivitas Kakao Per Kabupaten di Sulawesi Barat tahun terakhir (2021-2022)

No.	Kabupaten	Luas Areal/Ha			Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg)
		TBM (Immature)	TM (Mature)	TTM/TM (Damage)		
1	Majene	1.507	9.444	2.214	8.555	906
2	Polewali Mandar	1.591	4.609	5.730	36.452	876
3	Mamasa	116	10.878	3.466	7.224	664
4	Mamuju	1.377	17.344	21.110	11.653	672
5	Mamuju Utara	1.514	7.833	3.457	5.689	726
6	Mamuju Tengah	2.637	9.530	2.684	6.703	703

Sumber: Badan Pusat Statistik.2023

Selain itu, data produksi dalam skala per-kabupaten khususnya di Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan produktivitas yang paling tinggi dari kabupabaten yang ada di Sulawesi barat sebesar 906/Kg. Sebagai pihak yang melakukan budidaya, petani cenderung mendapatkan harga yang tidak tinggi. Hal ini dikarenakan sifat petani sebagai penerima harga (*price taker*) dalam rantai perdagangan kakao.

1.2. Rumusan Masalah

Rendahnya produksi hasil pertanian termasuk komoditas kakao disebabkan oleh ketidakmampuan dan kurangnya motivasi petani dalam melakukan pemeliharaan kebun. Kurangnya penguatan kelembagaan petani membuat kondisi ini semakin buruk. Di Majene, terdapat banyak lembaga petani yang sebagian besar berbentuk kelompok tani; Namun, hanya sekitar 10% dari lembaga-lembaga petani tersebut yang benar-benar beroperasi sebagai kelompok tani. Karena sebagian besar kelompok tani didirikan hanya untuk mengejar keuntungan melalui berbagai proyek pemerintah, maka sebagian besar kelompok tani tersebut tidak menjalankan peran dengan baik. Selain itu, kelompok tani yang ada saat ini masih tergolong baru, sehingga belum mampu secara optimal menjalankan perannya sebagai wadah penguatan kelembagaan dan kapasitas petani pada sub sistem produksi agribisnis kakao yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Lembaga apa saja yang terlibat dalam sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene?
2. Kendala apa saja yang mempengaruhi lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga dalam sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene?
3. Program strategis apa yang menjadi alternatif untuk penguatan kelembagaan sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengidentifikasi lembaga yang terlibat dalam sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene.
2. Menganalisis lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene.
3. Menentukan program strategis untuk mendukung penguatan kelembagaan sub sistem produksi agribisnis kakao di Kabupaten Majene.

1.4. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan referensi bagi pengembangan penelitian dan pengetahuan lebih lanjut yang relevan di bidang penguatan kelembagaan sub sistem produksi pertanian, khususnya pada komoditas kakao. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rancangan perencanaan dan kebijakan pembangunan di bidang pertanian, khususnya pertanian kakao.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Pertanian

2.1.1. Teori Pembangunan Pertanian

Istilah "pembangunan pertanian" dapat mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, dan terdapat banyak sekali ahli yang mendefinisikannya berdasarkan sudut pandang mereka yang unik. Menurut Azaki (2019), pembangunan pertanian adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani. Hal ini dicapai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang secara terus menerus menciptakan perubahan sosial bagi penduduk, terutama diarahkan pada aspek pertanian. Masyarakat diajak untuk maju agar semakin cerdas, terampil, bersemangat, dan tekun guna meningkatkan produktivitas pertanian, seperti yang dikemukakan oleh Banoewidjojo (1983) dalam (D.W, 2017). bertambah jumlahnya. Pembangunan pertanian, sebaliknya, diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat petani (Isbah & Iyan, 2016). Hal ini dicapai melalui investasi sumber daya teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pengembangan fasilitas ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

Berdasarkan pendapat sejumlah pakar industri, dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pembangunan pertanian sebagai berikut: (1) Pembangunan pertanian adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian; (2) Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas petani; (3) Pembangunan pertanian merupakan serangkaian perubahan sosial dalam masyarakat pertanian berkelanjutan; dan (4) Pembangunan pertanian memerlukan dukungan pemanfaatan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Hadisapoetro (1975) menjelaskan dalam (Yuwono, et al., 2016) bahwa pembangunan pertanian menyebabkan perubahan pada beberapa hal berikut: (1) komposisi kekuatan dalam masyarakat; (2) produksi, produktivitas, dan pendapatan; (3) alat dan bahan produksi; (4) pergeseran tujuan ekonomi pertanian dari subsisten ke komersial; dan (5) beralihnya pola sosial dari tertutup menjadi terbuka. Oleh karena itu, pembangunan pertanian mempunyai kepentingan tidak hanya terhadap perubahan yang berkaitan dengan masyarakat petani pada

khususnya, tetapi juga perubahan yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan. Jika kita berbicara mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, paling tidak kita harus berbicara mengenai persoalan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan ekonomi, kesempatan kerja, pemerataan, dan aspek sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan metrik tambahan selain efisiensi ekonomi dan produksi untuk mengevaluasi pembangunan pertanian. Metrik ini mencakup hal-hal seperti kemiskinan, pengangguran, kesetaraan, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan budaya.

2.1.2. Indikator Keberhasilan

Derajat urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi dalam suatu masyarakat berbanding lurus dengan derajat kompleksitas yang ditunjukkan oleh indikator-indikator pembangunan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin besar kebutuhan akan indikator-indikator yang bersifat spesifik dan komprehensif. Terdapat hubungan erat antara aksesibilitas data statistik dan penyediaan layanan yang efektif dan efisien oleh pemerintah serta faktor-faktor yang mendukung penerapan pengukuran indikator pembangunan. Selain itu, untuk mengembangkan pengukuran kinerja pembangunan pertanian yang spesifik dan mendalam, hanya ahli yang mempelajari adat dan tradisi setempat yang dapat melakukannya.

Menurut Soekarwati (1995) sebagaimana dikutip dalam (D.W, 2017), keberhasilan pembangunan pertanian dapat ditentukan apabila terjadi ekspansi yang signifikan di sektor pertanian disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat petani. Pembangunan pertanian, dalam pengertiannya yang paling mendasar, tidak hanya berpusat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan produksi; sebaliknya, hal ini harus dibarengi dengan perubahan dalam komunitas petani. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sejumlah faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kelembagaan, yang semuanya berpotensi mendorong pembangunan pertanian secara sinergis guna meningkatkan produksi pertanian. Namun perlu dipahami bahwa meskipun terjadi peningkatan produksi pertanian secara signifikan, hal ini tidak serta merta berarti peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Kesejahteraan petani juga sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dalam upaya menjamin ketersediaan pasar produksi pertanian (Azaki, 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan terpenuhinya dan berkembangnya sarana dan prasarana pertanian, serta pemasaran produk pertanian.

2.1.3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Pertanian

Membangun pertanian tidak bisa dilakukan sembarangan. Kurangnya analisis dan pemahaman mendalam terhadap wilayah-wilayah yang menjadi

sasaran pembangunan dapat berdampak pada terhambatnya atau gagalnya proses pembangunan. Membangun pertanian tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Untuk itu tahapan perencanaan pembangunan pertanian memerlukan tahapan yang lebih sistematis. Berikut uraian tahapan rencana pembangunan pertanian menurut Banoewidjojo (1983) yang dapat dilihat pada (D.W, 2017):

- a. Menetapkan tujuan atas dasar pertimbangan keadaan;
- b. Membuat analisis masalah-masalah yang akan timbul, sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- c. Memecahkan masalah-masalah dan memilih alternatif yang paling memungkinkan di antara jawaban masalah-masalah tersebut;
- d. Mengatur segala sarana berdasarkan alternatif jawaban masalah-masalah yang telah dipilihnya itu, dengan tepat menurut jenis, jumlah, tempat, dan waktu dalam bentuk rencana;
- e. Mencoba melaksanakan rencana; dan
- f. Membuat perubahan-perubahan berdasarkan hasil-hasil percobaan.

2.2. Aspek Kelembagaan Kelompok Tani

2.2.1. Kelembagaan Kelompok Tani

Istilah "kelembagaan" sering digunakan untuk merujuk pada organisasi yang terstruktur dan fokus pada peran yang dimainkan anggotanya, meskipun terdapat aspek yang membedakan kelembagaan dengan jenis organisasi lainnya. Menurut Bulkis (2010) yang dikutip dalam Bartholomius (2013), lembaga berkaitan dengan seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam proses mencapai kebutuhan-kebutuhan penting dalam hidupnya, sedangkan fokus organisasi adalah suatu struktur yang merupakan hasil interaksi formal dan informal antara sejumlah peran. Sedangkan kelembagaan digambarkan sebagai "seperangkat norma dari semua tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan dasar yang ada dalam masyarakat", sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2001) yang dikutip dalam Setiawan, Pakniany, dan Mutiar (2017). Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga tidak hanya mengacu pada organisasi atau struktur, tetapi juga mencakup aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Dapat dipahami, dari pengertian kelembagaan yang diberikan oleh para ahli, bahwa dalam upaya melaksanakan kebijakan atau program pemerintah yang mendorong produktivitas pertanian, pengembangan aspek kelembagaan juga merupakan strategi yang perlu dilakukan. dipertimbangkan. Menurut Bartholomius (2013), strategi utama yang selalu digunakan dalam program pembangunan pedesaan di seluruh dunia, termasuk seluruh departemen di Indonesia, adalah pengembangan kelembagaan. Hal ini terjadi meskipun tidak secara eksplisit

dinyatakan dalam program itu sendiri. Karena lembaga-lembaga memainkan peranan penting dalam pengembangan program, maka perlu dilakukan penguatan lembaga-lembaga tersebut tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal. Hal ini harus dilakukan karena peran penting yang dimainkan oleh institusi. Kalau bicara pembangunan, bisa dikatakan bahwa lembaga yang ideal adalah lembaga yang sudah terformalisasi dan sudah terlembaga. Lembaga seperti ini adalah lembaga yang mampu menghasilkan perubahan sekaligus menjaga keberlangsungan perubahan.

Kelembagaan memiliki beberapa aspek penting yang terdiri dari beberapa kelembagaan (muchtar dan Nurjannah, 2018), sebagai berikut:

1. Kelembagaan penyediaan input
Kelembagaan penyediaan input adalah akses dalam penyediaan input, yaitu upaya kelompok tani dalam memperoleh pupuk, bibit, tanaman, sarana produksi dan peralatan yang digunakan.
2. Kelembagaan penyediaan permodalan
Kelembagaan penyediaan permodalan adalah akses dalam penyediaan modal, baik perorangan maupun pihak lembaga keuangan yang ikut menyediakan modal kepada masyarakat dalam berusaha tani.
3. Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja
Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja adalah upaya kelompok tani dalam menyediakan tenaga kerja baik dalam desa maupun luar desa.
4. Kelembagaan penyediaan lahan
Kelembagaan penyediaan lahan berupa berapa luas lahan yang petani usahakan, aktivitas petani mulai dari penyediaan sampai dengan pemanenan.
5. Kelembagaan usaha tani
Kelembagaan usaha tani adalah kapan terbentuknya kelembagaan kelompok tani, siapa pemimpinnya, berapa jumlah anggota dalam kelompok tani dan keuntungan yang didapat dalam kelembagaan hasil hutan.
6. Kelembagaan pengelolaan hasil perkebunan
Kelembagaan pengelolaan hasil perkebunan adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan pada sub sistem produksi.
7. Kelembagaan pemasaran hasil
Kelembagaan pemasaran hasil adalah hal-hal apa saja yang memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil hutan.
8. Kelembagaan penyediaan informasi
Kelembagaan penyediaan informasi yaitu sumber informasi yang didapatkan kelompok tani dalam memasarkan hasil hutan dan bagaimana model penjualannya.

2.2.2. Prinsip Dasar Kelembagaan

Dradjat (2006) dalam (Jafar, 2016), menjelaskan bahwa dibangun atas tujuh prinsip dasar, yaitu:

- a. Prinsip kebutuhan, yakni kelembagaan yang dibangun dibutuhkan secara fungsional. Tidak dipaksakan keberadaannya apabila fungsi-fungsi dalam sub sistem agribisnis telah memenuhi kebutuhan.
- b. Prinsip efektivitas, pahami bahwa kelembagaan hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Jika kita memahami kelembagaan sebagai alat, maka elemen kelembagaan yang dikembangkan di setiap subsistem agribisnis haruslah efektif untuk mencapai tujuan.
- c. Prinsip efisiensi, efisiensi dalam penguatan kelembagaan berarti memilih alternatif pilihan yang relatif paling murah, mudah, dan sederhana namun tetap mampu mendukung dalam pencapaian tujuan.
- d. Prinsip fleksibilitas, kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan budaya setempat.
- e. Prinsip manfaat, kelembagaan yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat pedesaan.
- f. Prinsip pemerataan, kelembagaan yang dikembangkan mampu memberikan pembagian keuntungan atau manfaat secara proporsional kepada petani, dan
- g. Prinsip keberlanjutan, kelembagaan diharapkan terus berjalan meskipun lembaga penunjang secara langsung telah berkurang keterlibatannya.

2.2.3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan petani sangatlah penting karena beberapa alasan, yang terpenting adalah sebagai berikut: (1) banyak permasalahan pertanian yang dapat diselesaikan oleh organisasi petani; (2) memberikan upaya berkelanjutan kepada petani untuk menyebarkan teknologi dan pengetahuan teknis; dan (3) mempersiapkan petani untuk bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih kompetitif, terbuka, dan (4) Mendorong kerjasama antar petani, yang dapat mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki petani secara lebih efektif (Listyati, Wahyudi, & Hasibuan, 2014).

Menurut Elizabeth dalam (Bartholomius, 2013), terdapat tuntutan perubahan operasional pada tiga pilar kelembagaan. Pilar-pilar tersebut adalah sebagai berikut: (1) kelembagaan tradisional lokal yang ada di masyarakat; (2) institusi pasar (sektor swasta) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka; dan (3) sistem institusi politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (sektor publik). Ketiga pilar tersebut diharapkan saling bekerjasama dan melakukan penyesuaian sehingga mampu beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah. Inilah yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan, yang dapat dipahami sebagai upaya

pemberdayaan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal (dalam suatu sistem hubungan) dari seluruh lembaga yang ada.

Terdapat sejumlah teori berbeda yang mendukung pentingnya penguatan kelembagaan dalam berbagai konteks, termasuk dalam industri agribisnis kakao. Sebab, penguatan kelembagaan merupakan konsep yang luas dan beragam. Menurut Siswati, Latifa, Rini, dan Mufti (2015), berikut beberapa teori utama yang relevan dengan proses penguatan kelembagaan:

a. Teori Institusional

Teori institusional menekankan pentingnya institusi dan norma dalam menentukan perilaku dan cara orang berinteraksi satu sama lain. Menurut teori ini, institusi memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan yang terjalin antara berbagai aktor yang membentuk suatu sistem. Dalam konteks agribisnis kakao, istilah “penguatan kelembagaan” dapat merujuk pada penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti koperasi petani, lembaga pemerintah, dan asosiasi petani, dengan tujuan meningkatkan kerja sama, transparansi, dan efisiensi. dalam produksi dan distribusi kakao. Contoh lembaga tersebut adalah *National Cocoa Association* dan *International Cocoa Organization*.

b. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan antara pelaku dan agen, baik dalam organisasi atau sistem ekonomi, merupakan fokus utama teori keagenan. Petani sering kali berperan sebagai agen dalam agribisnis kakao, yang mana mereka bertindak atas nama prinsipal (bisa berupa pemerintah, perusahaan, atau pembeli). Penetapan insentif dan pengendalian yang sesuai dapat menjadi bagian dari proses penguatan kelembagaan. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa agen bertindak demi kepentingan terbaik para pelaku dan untuk mendorong keselarasan tujuan di antara semua pihak yang terlibat.

c. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini mengkaji bagaimana orang-orang yang berbeda mengambil kesimpulan yang masuk akal tentang kehidupan mereka dengan mempertimbangkan alasan logis dan prioritas yang telah mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dapat membantu dalam memahami bagaimana petani, pedagang, dan pelaku usaha kakao lainnya mengambil keputusan terkait produksi, harga, dan perdagangan di sektor agribisnis kakao. Untuk memperkuat kelembagaan, mungkin perlu merancang insentif yang tepat, sehingga pilihan yang rasional pada akhirnya akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

d. Teori Pengembangan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan setiap kali seseorang mengambil keputusan. Penguatan kelembagaan dalam konteks agribisnis kakao

dapat mengarah pada pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, perlindungan hak-hak petani, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan di industri kakao dapat dibantu oleh lembaga-lembaga yang kuat.

e. Teori Organisasi

Studi tentang bagaimana organisasi beroperasi, berubah, dan maju sebagai respons terhadap lingkungan tempat mereka berada adalah fokus teori organisasi. Peningkatan efektivitas, kemampuan beradaptasi, dan kapasitas organisasi yang terlibat dalam agribisnis kakao, seperti kelompok tani dan lembaga penelitian, itulah yang dimaksud dengan “penguatan kelembagaan”. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan tingkat inovasi dan daya saing dalam industri kakao.

Penguatan kelembagaan merupakan strategi penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sejumlah industri berbeda, termasuk industri agribisnis kakao. Penggabungan berbagai teori yang dibahas di atas dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya institusi yang kuat dalam meningkatkan kinerja industri kakao dan keberlanjutannya.

2.2.4. Peran Kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian

Dalam melakukan usahataniya petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah. Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika petani mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif. Untuk keperluan ini diperlukan pemahaman mengenai suatu kelembagaan di tingkat petani. Secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke generasi, namun tantangan jaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Kelembagaan petani yang efektif ini diharapkan mampu mendukung pembangunan pertanian. Di tingkat petani lembaga diperlukan sebagai: (a) wahana untuk pendidikan, (b) kegiatan komersial dan organisasi sumberdaya pertanian, (c) pengelolaan properti umum, (d) membela kepentingan kolektif, dan (e) lain-lain. Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Kelembagaan di Indonesia perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani,

lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan) (Ratna et al., 2023)

Kelompok tani merupakan gabungan beberapa petani yang memiliki persamaan tujuan, persamaan kondisi lingkungan baik social maupun ekonomi. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut terikat secara formal, Selain itu pemerintah juga lebih mudah dalam menyalurkan bantuan kepada petani kakao melalui kelompok tani yang telah terbentuk. Pembentukan kelompok tani akan lebih mempermudah para petani untuk membantu petani kakao melakukan kegiatan usahatani. Hal tersebut dikarenakan bekerja berkelompok lebih efisien dibandingkan dengan bekerja secara individu. Tergabungnya para petani dalam kelompok tani dilatarbelakangi oleh persoalan yang sama. Hal itu dikarenakan adanya kelompok petani dapat saling bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan inovasi-inovasi yang didapatkan dari berbagai sumber untuk meningkatkan kegiatan usahatani kakao. Sehingga mempermudah pemerintah memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani untuk memajukan usahatani kakao dan memberikan solusi yang berkaitan dengan penghambatan dalam melakukan kegiatan usahatani kakao (Lestari & Idris, 2019).

Peran kelompok tani dalam kegiatan agribisnis

1. Kelompok tani sebagai wadah berbagi informasi

Kelompok tani sebagai wadah berbagi informasi yaitu kelompok tani dapat memberikan informasi yang didapatkan dari penyuluh maupun dari pihak-pihak lain yang paham tentang kakao. Informasi yang didapatkan kelompok tani antara lain yaitu pemilihan bibit kakao yang unggul, pemeliharaan kakao dan penanganan hama dan penyakit pada tanaman kakao. Informasi yang sangat dibutuhkan petani yaitu informasi mengenai penanganan hama dan penyakit serta pengembangan kakao. Dimana pengembangan kakao yang dimaksud yaitu satu pohon kakao terdapat lebih dari 2 jenis kakao.

2. Kelompok tani sebagai tempat diskusi

Kelompok tani sebagai tempat diskusi yaitu kelompok tani menjadi tempat bagi para anggotanya untuk memperoleh solusi dari setiap masalah dalam hal budidaya kakao maupun penanganan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao dan tanaman kakao yang seharusnya sudah mulai berbuah tetapi tidak berbuah. Dalam hal ini kelompok tani bekerjasama dengan penyuluh untuk mengatasi masalah-masalah dalam budidaya kakao melalui forum diskusi yang menghadirkan anggota kelompok dan penyuluh. Selain masalah penanganan hama dan penyakit masalah lain yang dihadapi kelompok tani yaitu kelangkaan pupuk.

3. Kelompok tani sebagai wadah untuk belajar

Kelompok tani sebagai wadah untuk belajar yaitu kelompok tani menjadi tempat bagi para anggota untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satu

pembelajaran yang didapatkan kelompok tani yaitu cara pemeliharaan kakao yang baik.

4. Kelompok tani sebagai unit produksi

Kelompok tani sebagai unit produksi yaitu kelompok tani sebagai penyedia sarana dan prasarana produksi, kelompok tani berfungsi untuk mengadakan sarana produksi yang terjangkau dan berkualitas juga memperbaiki prasarana-prasarana yang menunjang sarana produksi. Selain itu perawatan kakao yang rutin dilakukan yaitu pemangkasan yang dilakukan satu kali dalam sebulan, pemupukan 2 kali dalam satu tahun yaitu awal musim hujan dan akhir musim hujan pupuk yang digunakan diperoleh kelompok tani dari pemerintah sehingga anggota kelompok tani dapat memperoleh pupuk dengan mudah. Penanganan hama dan penyakit yang saat ini dilakukan oleh petani yaitu penyemprotan dengan obat kimia akan tetap jika hama dan penyakit masih dapat ditangani dengan bahan alami maka digunakan bahan alami sebagai salah satu cara penanganan hama dan penyakit yang menyerang kakao.

5. Kelompok tani sebagai wadah kerjasama

Kelompok tani sebagai wadah kerjasama yaitu kelompok tani harus dapat bekerjasama dengan penyuluh maupun pihak-pihak lainnya yang paham mengenai kegiatan usahatani kakao serta kerjasama dengan para anggota kelompoknya dalam melakukan kegiatan usahatani kakao. Kerjasama yang dilakukan kelompok tani dengan anggotanya menyangkut tentang pemeliharaan kakao yang berupa pemangkasan. Kerjasama yang dilakukan berupa pemangkasan karena pemangkasan merupakan kegiatan pemeliharaan kakao yang rumit dan memerlukan teknik yang tepat sehingga tidak semua anggota kelompok tani paham dengan baik. Selain pemangkasan penanaman kakao juga dilakukan kelompok tani bersama para anggota karena penanaman kakao memerlukan pengajiran dan jarak tanam yang tepat sehingga petani tidak sembarangan menanam kakao (Lestari & Idris, 2019).

2.3. *Interpretative Structural Modeling (ISM)*

Model struktural dan keterkaitan antar lembaga dan kebijakan diperlukan untuk memperoleh usulan program strategis yang lebih berkualitas dan mengetahui lembaga mana yang diperkirakan berperan dalam upaya peningkatan produksi kakao. Dengan menerapkan teknik *Interpretative Structural Modeling (ISM)*, diharapkan tujuan tersebut dapat dicapai. Bentuk metode ini adalah fokus proses pembelajaran (*focus learning process*), dan ISM merupakan alat berbasis komputer yang dapat membantu kelompok dalam mengidentifikasi dan menarik berbagai macam kesimpulan mengenai hubungan antar faktor dalam suatu permasalahan atau permasalahan yang kompleks (Munawir, 2021).

Identifikasi struktur sistem yang kompleks dan perumusan sistem pengambilan keputusan yang efisien merupakan prinsip dasar yang mendasari

metode ISM. Ke depan, hal ini akan memberikan manfaat bernilai tinggi bagi perumusan sistem yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Munawir, 2021). Hal ini karena identifikasi struktur dalam suatu sistem yang kompleks merupakan titik awal dari proses ini.

Intepretative Structural Modelling (ISM) menekankan pada penguraian sistem yang rumit menjadi komponen yang lebih mudah dikelola. Hal ini juga menawarkan pemahaman mendasar tentang skenario yang rumit dan membantu dalam perumusan respons yang sesuai terhadap tantangan. Melalui penggunaan teknik ISM, model sistem yang tidak jelas dapat diubah menjadi model sistem yang terlihat. Berdasarkan penelitian Prasetyaningtyas tahun 2019, metodologi ISM menghasilkan tiga hal, yakni (1) Elemen kunci, (2) Struktur hierarki elemen, dan (3) Klasifikasi elemen ke dalam empat sektor berbeda.

Aspek terpenting dari program yang dijalankan oleh suatu lembaga dapat dipecah menjadi sembilan kategori: 1) Tujuan program, 2) Persyaratan program, 3) Permasalahan utama program, 4) Tolok ukur penilaian tujuan, 5) Lembaga yang terlibat, 6) Komunitas yang terkena dampak, 7) Kemungkinan perubahan, 8) Kebutuhan aktivitas, dan 9) Pengukuran aktivitas. 1) Tujuan program, 2) Persyaratan program, 3) Permasalahan utama program, 4) Tolok ukur untuk menilai tujuan. Faktor-faktor berikut akan diselidiki sebagai bagian dari penelitian ini: (1) lembaga-lembaga yang terlibat; (2) permasalahan program; dan (3) kemungkinan penyesuaian atau program strategis (Raharja, 2020).

2.4. Konsep Agribisnis

Agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang mencakup salah satu atau keseluruhan mata rantai produksi, pengelolaan hasil, dan pemasaran yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian. Agribisnis sendiri terdiri dari beberapa sub sistem yaitu pembuatan, pengadaan dan pendistribusian berbagai sarana produksi, sub sistem kegiatan produksi dalam usahatani yang menghasilkan berbagai hasil pertanian, serta subsistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian berbagai hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani dan hasil pertanian atau olahannya sampai ke konsumen (Firdaus, 2015).

Konsep agribisnis sebenarnya merupakan suatu konsep yang utuh, mulai dari proses produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pertanian. Agribisnis berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis lainnya melalui peningkatan efisiensi dan nilai tambah. Selain itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta penunjang usaha industri dan jasa (Firdaus, 2015).

Menurut Siswati *et.al.*, (2015) menegaskan bahwa kegiatan usaha agribisnis meliputi empat subsistem, yaitu:

- a. Sub sistem hulu, yakni kegiatan agribisnis yang menyediakan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, mesin atau peralatan, benih, dan bibit, disebut sebagai kegiatan hulu. Subsistem agribisnis ini dikenal juga dengan istilah rantai pasok pertanian. Perusahaan agribisnis hulu mampu memberikan pelayanan terhadap usahatani melalui pemberian pelayanan yang berkualitas, pemberian bimbingan teknis produksi, pemberian bimbingan manajemen dan hubungan agribisnis, fasilitasi pembelajaran pelatihan bagi petani, pemberian dan penjangkangan praktik agribisnis. informasi, dan kemampuan mengembangkan kerja usaha (kemitraan).
- b. Sub sistem produksi tani seperti kegiatan ekonomi menggunakan sarana produksi untuk menghasilkan produk primer pertanian, seperti: usaha tanaman pangan, usaha tanaman hortikultura, usaha tanaman obat. Usaha perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sub sistem usahatani sebagai produsen pertanian berfungsi melaksanakan teknik produksi agar produksi dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan kuantitasnya.
- c. Sub sistem agribisnis hilir merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah hasil pertanian primer menjadi produk olahan dan kegiatan perdagangan baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang mengubah produk primer pertanian menjadi produk olahan. Industri pengolahan makanan, industri pengolahan serat (yang meliputi pengolahan kayu, kulit, karet, jerami, dan sutra), industri jasa, industri farmasi, dan pasar bahan kecantikan merupakan contoh kegiatan ekonomi yang termasuk dalam sektor industri subsistem agribisnis hilir. Subsistem agribisnis hilir bertugas melakukan pengolahan tambahan (primer, sekunder, dan tersier) guna mengurangi kehilangan nilai, meningkatkan kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen, serta memperlancar pemasaran dengan merencanakan operasional sistem pemasaran secara efektif.
- d. Sub sistem lembaga penunjang merupakan setiap kegiatan memberikan kontribusi terhadap penyediaan jasa di bidang agribisnis yang meliputi pendirian lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah, serta pengembangan jasa transportasi.

2.5. Konsep Strategi

Menurut Rangkuti (2018), strategi adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya. Tujuan perusahaan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat inkremental (selalu

meningkat), berkesinambungan, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan, seperti yang diungkapkan oleh Hamel dalam (Rangkuti, 2018). Menurut Hamel, strategi adalah suatu tindakan yang terus menerus menjadi lebih luas. Oleh karena itu, perumusan strategi harus selalu dimulai dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan, bukan apa yang telah terjadi. Kompetensi inti sangat penting dalam dunia bisnis saat ini karena pesatnya perkembangan pasar baru dan perilaku pelanggan yang terus berubah.

2.6. Tanaman Kakao dan Fluktuasi Harga Kakao

Kakao (*Theobroma Cacao L.*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan penting yang pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1560, namun baru menjadi komoditas penting sejak tahun 1951 dan menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia selain karet. Tanaman jenis ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Selain fungsi tersebut, kakao juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah dan pengembangan agroindustri (Saputra, 2015).

Hukum penawaran dan permintaan yang berlaku di pasar dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori untuk menjelaskan fluktuasi harga. Menurut hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan berkurang jika harga naik, dan hukum penawaran menyatakan jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang (Febriana, 2018). Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang.

Pergerakan menuju pasar bebas dengan sendirinya akan berdampak pada mekanisme pasar komoditas pertanian, terutama di pasar dalam negeri. Menurut Aklimawati dan Wahyudi (2013), dampaknya adalah dinamika harga yang berfluktuasi dan arah kebijakan perdagangan. Harga kakao cenderung sangat fluktuatif dan kadang-kadang cenderung mengalami perubahan harga yang relatif besar. Dalam kebanyakan kasus, pelaku ekonomi yang beroperasi di pasar uang dan pasar modal yang bertanggung jawab mengukur tingkat volatilitas harga. Namun kecenderungan volatilitas yang tinggi juga tercermin pada pola pergerakan harga yang terjadi di pasar komoditas pertanian. Pola ini menunjukkan bahwa harga komoditas pertanian cenderung tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, menilai tingkat volatilitas harga di pasar komoditas menjadi hal yang patut diperhatikan (Febriana, 2018).

Pola variasi yang berbeda dalam data deret waktu, khususnya data keuangan, disebut dengan volatilitas. Hasil analisis volatilitas harga dapat digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan terkait permasalahan risiko usaha, oleh karena itu analisis volatilitas harga diperlukan oleh para pelaku ekonomi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, terdapat fluktuasi

harga komoditas pertanian yang signifikan. Menurut Aklimawati dan Wahyudi (2013), salah satu akibat dari memiliki data dengan tingkat volatilitas yang tinggi adalah variabel error akan mempunyai varians yang tidak konstan.

Pada tanggal 23 Oktober 2023 harga kakao mencapai titik tertinggi sepanjang masa di level GBP 3.277 per ton (Rp 63,90 juta) kontrak Maret pada penutupan perdagangan. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak kontrak berjangka yang mulai diperdagangkan pada tahun 1920. Lonjakan harga kakao ini justru terjadi di tengah kenaikan permintaan menjelang Halloween di Amerika Serikat serta perayaan Hari Natal. Namun, lonjakan harga tersebut seharusnya berdampak ke Indonesia mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen kakao terbesar di dunia. Lonjakan harga kakao menjadi kekhawatiran di banyak dunia, termasuk Amerika Serikat (AS). Pasalnya, kebutuhan cokelat di AS akan melonjak untuk perayaan Halloween pada 31 Oktober. Pabrik-pabrik di Amerika Utara memproses kakao 17,9% lebih sedikit pada kuartal III-2023 dibandingkan tahun lalu. Selain itu, permintaan kakao di Eropa, Pantai Gading, dan Brasil masih cukup baik di tengah tingginya harga kakao sementara penurunan permintaan di Asia pada kuartal ketiga tidak separah yang diperkirakan.

Terjadinya fluktuasi produksi kakao ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah luas lahan, luas lahan sangat berpengaruh besar terhadap suatu peningkatan produksi, dimana dalam proses produksi semakin sempit lahan yang dimiliki maka semakin sedikit pula jumlah produksi yang akan dihasilkan. Selain hasil produksi yang banyak ditentukan oleh luas atau sempitnya suatu lahan tetapi juga dapat dilihat dari segi yang lainnya seperti jenis tanah, macam-macam penggunaan lahan, topografinya (tanah dataran tinggi, rendah atau dataran yang dekat pantai). Fluktuasi harga merupakan salah satu permasalahan umum yang sering terjadi dalam pemasaran komoditas kakao (Sjamsir et al., 2022).

2.7. Rendahnya Produktivitas dan Kualitas Biji Kakao di Indonesia

Jika dibandingkan dengan biji kakao asal Ghana dan Pantai Gading, kualitas biji kakao yang diproduksi di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan biji kakao yang diproduksi di kedua negara lainnya. Kegagalan dalam melakukan proses pasca panen, khususnya fermentasi, menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas biji kakao yang diproduksi di Indonesia. Namun karena tidak mudah meleleh seperti kakao lainnya, kakao asal Indonesia banyak diminati di seluruh dunia. Ini merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki kakao Indonesia. Sejalan dengan manfaat tersebut, peluang pasar kakao di Indonesia cukup terbuka, baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan pasar dalam negeri. Dengan kata lain, kemungkinan pemanfaatan industri kakao sebagai motor ekspansi ekonomi dan redistribusi pendapatan terbuka lebar. Namun, kualitasnya masih tergolong rendah, produktivitas pertanian kakao Indonesia yang didominasi oleh perkebunan rakyat juga rendah. Hal ini disebabkan masih tingginya serangan hama penggerek buah

kakao (PBK), serta perkembangan hilirisasi produksi kakao yang juga masih rendah. Perkebunan rakyat di Indonesia menghasilkan sebagian besar kakao negara. Permasalahan yang relatif kompleks ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao (Nickyta, 2017). Peluangnya terletak pada investor dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao.

rendahnya produktivitas dan kualitas kakao Indonesia terutama disebabkan oleh beberapa hal, salah satu penyebab utamanya adalah karena biji kakao yang diperdagangkan oleh petani pada umumnya tidak difermentasi terlebih dahulu. Padahal kualitas biji dan harga jual kakao fermentasi lebih baik dibandingkan dengan penjualan kakao tanpa fermentasi, dan harga patokan di pasar internasional didasarkan pada biji kakao fermentasi. Ketidakkampuan petani kakao skala kecil dalam memanfaatkan teknologi dan keterampilan terkait pengetahuan manajerial, serta kurangnya perhatian dari petani, menjadi penyebab utama rendahnya kualitas kakao. Akibatnya, para petani kakao pada umumnya cenderung memperdagangkan biji kakao yang tidak difermentasi (Manalu, 2018).

Pada tahun 2022, produksi kakao mencapai 667,3 ribu ton. Jumlah ini bukanlah yang tertinggi sepanjang sejarah. Puncak produksi tercatat pada tahun 2012 dengan angka 740,5 ribu ton, tetapi sayangnya, produksi kakao kemudian mengalami penurunan walau sempat diprediksi akan meningkat menjadi 706 ribu ton pada tahun 2022. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan produksi ini, diantaranya menurunnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola perkebunan kakao, masalah kondisi tanah yang menunjukkan gejala 'letih' (soil fatigue), penuaan tanaman kakao, serangan hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit vascular streak dieback (VSD), serta rendahnya penggunaan pupuk bahkan ditemui petani yang tidak mengaplikasikan pupuk pada tanaman kakao.

Menurut Indonesia Investments, 90 persen produksi kakao di Indonesia berasal dari petani dengan keterbatasan finansial dan peralatan yang terbatas. Kondisi ini turut berperan dalam penurunan produksi. Tentu kondisi ini juga turut menyumbang jumlah produksi kakao yang semakin menurun. Pasokan biji kakao dalam negeri yang kuat, maka Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ini dengan lebih baik dan memastikan industri kakao tetap berkelanjutan.

Kakao Indonesia, dengan segala potensinya, masih menghadapi tantangan dalam hal mutu biji kakao. Mutu yang bervariasi, kurangnya fermentasi, kelembaban yang tidak cukup, ukuran biji yang tidak seragam, tingginya kadar kulit, keasaman yang tinggi, dan rasa yang tidak konsisten, semuanya berkontribusi pada harga yang relatif rendah di pasar global. Biji kakao Indonesia sering dikenakan potongan harga dalam perdagangan internasional, meskipun kakao Indonesia memiliki keunggulan dalam kandungan lemak dan kemampuan

menghasilkan bubuk kakao berkualitas. Mutu biji dan harga jual kakao yang telah difermentasi lebih baik dibanding yang belum difermentasi dan patokan harga di pasar internasional didasarkan pada biji kakao yang telah difermentasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas biji kakao yaitu dengan Langkah awal yang penting dalam memajukan industri kakao di Indonesia adalah memberikan perhatian khusus pada produksi kakao dalam negeri. Pengusaha perkebunan kakao perlu berfokus pada peningkatan mutu biji kakao yang mereka hasilkan.

Salah satu masalah umum pada mutu biji kakao adalah biji kakao yang tidak atau kurang terfermentasi dan hal ini terutama terjadi di perkebunan kakao rakyat. Fermentasi yang baik pascapanen adalah kunci untuk menghasilkan biji kakao berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global. Proses fermentasi yang tepat dapat meningkatkan harga jual dan pendapatan petani perkebunan kakao rakyat.

Pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Biji Kakao, yaitu SNI 2323-2008-Amd1-2010 tentang Biji Kakao sebagai acuan mutu biji kakao Indonesia. Standar mutu ini adalah panduan penting untuk pengawasan dan pengendalian mutu. Semua biji kakao yang akan diekspor harus memenuhi standar mutu ini, dan ini diawasi oleh lembaga pengawasan yang ditunjuk. Salah satu prasyarat menjaga mutu biji kakao tersebut adalah fermentasi. Mutu biji kakao yang baik akan meningkatkan harga jual biji kakao Indonesia, kesejahteraan petani, dan kepercayaan industri pengolahan kakao dalam negeri. Dengan mutu biji yang baik, produksi dan ekspor biji kakao Indonesia bisa meningkat, dan ini akan memperkuat kepercayaan dari negara tujuan ekspor. Dengan komitmen pada mutu, Indonesia dapat meraih kesuksesan dalam industri kakao (BISIP 2023).

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu dalam topik produksi agribisnis kakao dan strategi pengembangan kelembagaan agribisnis kakao yang diuraikan dalam judul, peneliti, dan hasil penelitian pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Tahun	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Strategi Pengembangan Agribisnis Kakao di Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (2022)	Resky Ryadha S	Rendahnya kualitas biji kakao di pasaran menjadi penyebab utama rendahnya harga kakao. Peningkatan produktivitas dan mutu kakao dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai fasilitas dari pemerintah seperti subsidi input dan pinjaman modal KUR serta fasilitas dari

			perusahaan eksportir berupa pembinaan untuk meningkatkan kapasitas petani. Fasilitas lain yang diberikan pemerintah dan perusahaan eksportir antara lain memaksimalkan serapan teknologi dari penyuluh dan pendamping untuk mendapatkan biji kakao yang memenuhi standar SNI, dan kemitraan dengan eksportir.
2	Strategi Pengembangan Agribisnis Kakao di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso (2019)	Susan Sampe Pandanan	Ada dua faktor yang terlibat dalam proses pengembangan agribisnis di Desa Meko, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain adanya kebijakan pengembangan komoditas kakao oleh Departemen Pertanian, program pemerintah membuka industri pengolahan biji kakao, ketersediaan tenaga kerja, luasnya saluran distribusi kakao, dan tingginya permintaan pasar terhadap kakao. Faktor internal antara lain ketersediaan peralatan pengolahan biji kakao dan program pemerintah untuk membuka industri pengolahan biji kakao.
3	Strategi Pengembangan Agribisnis Kakao di Sulawesi Tengah (2019)	Siti Yulianti Chansa Arfah	Terjadi penurunan luas areal perkebunan kakao yang diikuti dengan penurunan volume produksi dan ekspor. Strategi pengembangan agribisnis kakao yang dihasilkan melalui analisis SWOT dan arsitektur strategi lebih diarahkan pada peningkatan karya petani kecil di perkebunan rakyat dengan memperkuat kelompok tani dan mengoptimalkan peran asosiasi. Di sisi lain, untuk perkebunan negara dan swasta, fokusnya lebih pada peningkatan volume

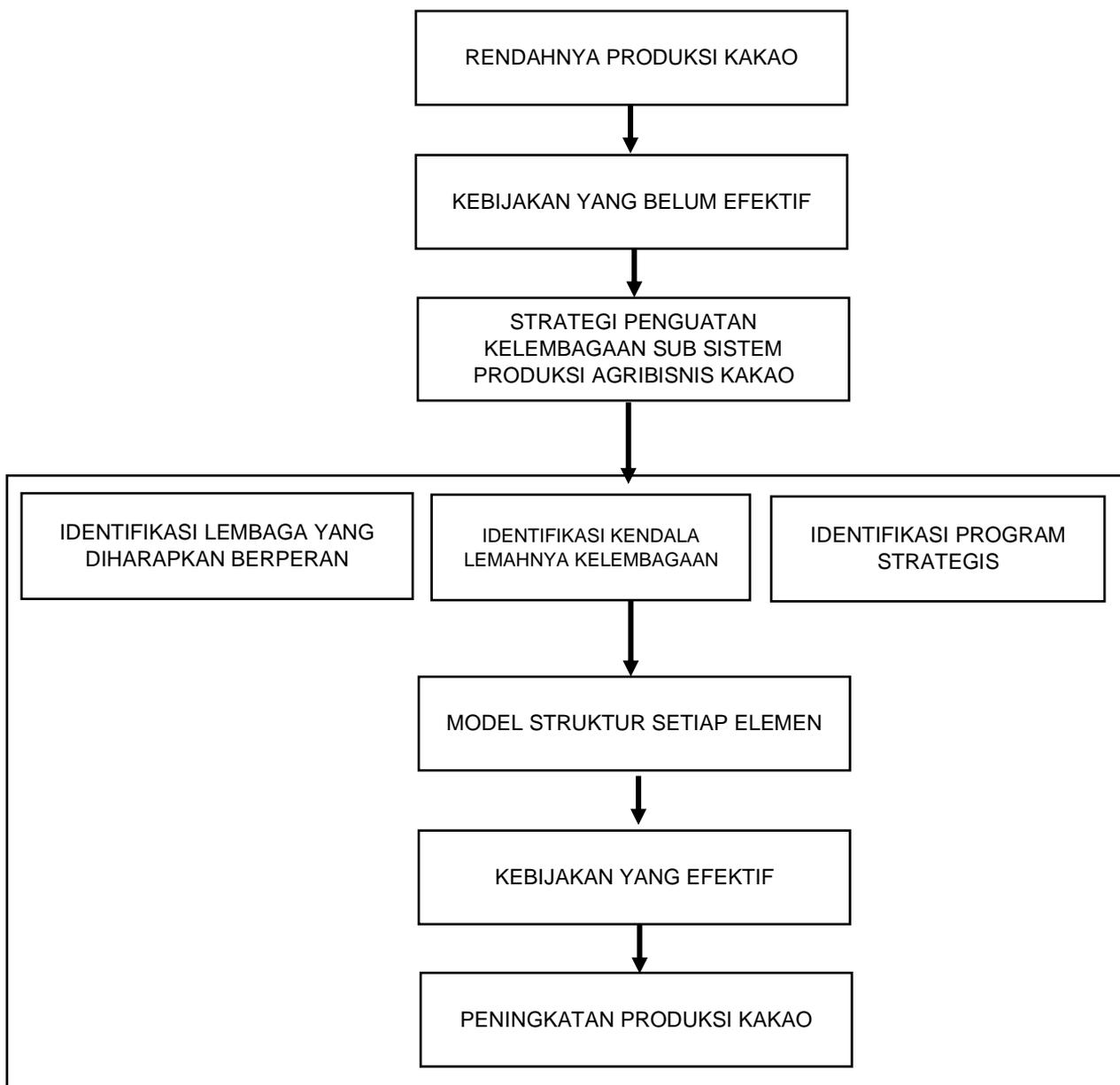
			produksi dan diversifikasi produk kakao dengan tujuan pasar ekspor. Meningkatnya kegiatan promosi mengenai kakao dan manfaatnya juga harus menjadi perhatian jika ingin melihat peningkatan jumlah kakao yang dikonsumsi di dalam negeri.
4	Kelembagaan Agribisnis Pada Desa Berbasis Komoditas Perkebunan (2018)	Wahyuning K Sejati dan Herman Supriadi	Kelompok tani belum mempunyai posisi tawar yang kuat untuk menjalin kerjasama usaha dengan pengusaha perkebunan atau industri hasil perkebunan. Ini bisa menjadi masalah di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan kelembagaan kelompok tani guna meningkatkan akses informasi, teknologi, input, permodalan, dan pemasaran hasil secara partisipatif, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pengaktifan kelembagaan koperasi sebagai lembaga pendukung yang mampu berperan aktif sebagai pemberi modal dan pinjaman, penyalur input pertanian, lembaga pemasaran produk pertanian, dan penghubung seluruh sistem agribisnis merupakan hal lain yang perlu dilakukan.

Berdasarkan tabel di atas, meskipun terdapat berbagai aspek tentang pengembangan kelembagaan dan produksi agribisnis yang telah diuji oleh beberapa peneliti, namun belum ada yang membahas secara mendalam tentang strategi penguatan kelembagaan sub sistem produksi agribisnis kakao. Sehingga, penelitian ini akan fokus terhadap aspek tersebut.

2.9. Kerangka Pikir

Usahatani kakao yang menjadi penghidupan sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Majene, sudah selayaknya mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, usahatani tersebut belum mencapai potensi maksimal dalam memberikan manfaat bagi petani kakao. Beberapa penyebabnya antara lain produktivitas yang kurang optimal serta masih lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai perdagangan kakao di Kabupaten Majene. Posisi tawar yang buruk ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk fakta bahwa mayoritas pengepul membeli langsung dari petani, rendahnya tingkat produktivitas petani, dan tidak efisiennya rantai pasok kakao.

Analisis terhadap kelembagaan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pelaku dan lembaga mana yang diperkirakan akan berperan dalam program peningkatan produksi kakao. Selain itu, melakukan analisis terhadap berbagai aktor dalam suatu sistem akan menghasilkan hierarki yang berbeda dalam sistem, yang akan mempermudah pembuat kebijakan dalam merencanakan program. Untuk meningkatkan produksi kakao, selain mengidentifikasi kelembagaan yang berperan, perlu diketahui kendala-kendala yang menyebabkan lemahnya peran kelembagaan dan strategi program penguatan kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan model yang dapat mendukung perencanaan program yang dapat mendorong pengembangan agribisnis kakao serta penguatan kelembagaannya di lokasi penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian